

Ketua TP Posyandu Enam SPM Buton Selatan Tinjau Layanan Terpadu di Sejumlah Desa



Ketua TP Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buton Selatan, Ny. Hj. Siti Norma Adios

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Ketua TP Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buton Selatan, Ny. Hj. Siti Norma Adios, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu melakukan kunjungan kerja ke beberapa Posyandu 6 SPM di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Kunjungan tersebut turut didampingi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selaku sekretariat Posyandu 6 SPM Kabupaten Buton Selatan. Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Desa Bola Kecamatan Batauga, Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa, serta Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa.

"Posyandu 6 SPM ini bukan hanya pelayanan kesehatan ibu

Lanjut ke Hal: 7



Wawali Wa Ode Hamsina Apresiasi SMPN 18 Baubau Kembali Tembus Nasional pada Ajang LKBB di Jakarta, Dua Kali Berprestasi

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Sebanyak 48 siswa SMP Negeri 18 Baubau akan mewakili Kota Baubau dalam ajang Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) tingkat nasional di Jakarta pada 16 Mei 2026. Kontingen yang terbagi dalam tiga regu itu ditargetkan mampu menembus posisi 10 besar nasional sekaligus memperkenalkan budaya Buton melalui variasi formasi dan atraksi yang disiapkan.

Kepala SMP Negeri 18 Baubau Arman mengatakan setiap regu membawa konsep berbeda yang mengangkat identitas lokal. Regu A menampilkan tema Raja Wakaka,

Regu B mengusung cerita rakyat Wandiu-diu, sedangkan Regu C fokus pada kekompakan teknis dan disiplin baris-ber-

Lanjut ke Hal: 7

Wakapolda Sultra Turun Langsung Pantau Penanganan Banjir, 650 Warga Kendari Terdampak Banjir

Laporan: Mashuri

KENDARI, BP - Wakapolda Sulawesi Tenggara Gidion Arief Setyawan bersama Irwasda Polda Sultra Johanes Pangihutan Siboro meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Wanggu, Kota Kendari, Senin (11/5/2026), guna memastikan keselamatan warga terdampak serta kesiapan posko penanganan bencana yang telah dibangun aparat gabungan.

Peninjauan dilakukan setelah hujan berintensitas ting-



Wakapolda Sulawesi Tenggara Gidion Arief Setyawan bersama Irwasda Polda Sultra Johanes Pangihutan Siboro meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Wanggu,

gi selama beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Kali Wanggu meluap dan

merendam kawasan permukiman warga. Genangan air tidak hanya memasuki ru-

mah-rumah penduduk, tetapi juga menutup

Lanjut ke Hal: 7

Warga Terdampak Banjir Kendari Terima Bantuan CSR dari Bank Sultra Berupa 300 Paket Sembako



Bank Sultra kembali menunjukkan perannya sebagai institusi perbankan daerah yang aktif dalam kegiatan sosial

Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Bank Sultra kembali menunjukkan perannya sebagai institusi perbankan daerah yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Kota Kendari, Kamis (14/5/2026). Bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) itu berupa 300 paket sembako senilai Rp93,3 juta yang difokuskan untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat bencana.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, kepada Wali Kota Kota Kendari, Siska Karina Imran, di Kantor Dinas Sosial Kota Kendari. Penyaluran bantuan turut

disaksikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana.

Sebanyak 280 paket sembako disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Kendari untuk didistribusikan ke sejumlah titik terdampak banjir. Sementara 20 paket lainnya diberikan secara langsung kepada warga di RW IV dan RW V Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup berat akibat banjir beberapa hari terakhir.

Selain bantuan bahan pokok berupa beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir, Bank Sultra juga menyerahkan santunan kepada keluarga korban jiwa akibat

Lanjut ke Hal: 7

Tanah Licin Pascahujan, Pria 75 Tahun di Buton Meninggal Tertindih Pohon Pisang

Laporan: La Harman

BUTON, BP Aktivitas menebang pohon pisang di kebun milik sendiri berakhir tragis bagi seorang warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Seorang pria berinisial U (57) meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon pisang di Desa Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Selasa (12/5/2026).

Korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri ketika tiga pohon pisang di sekitar lokasi ikut roboh secara bersa-



Pria 57 Tahun di Buton menebang pohon pisang di kebun milik sendiri berakhir tragis

maan. Kondisi tanah yang licin akibat hujan serta posisi lahan yang miring disebut menjadi faktor utama

penyebab kecelakaan tersebut.

Peristiwa itu son-

Lanjut ke Hal: 7

Wawali Wa Ode Hamsina Apresiasi SMPN 18 Baubau Kembali Tembus Nasional pada Ajang LKBB di Jakarta, Dua Kali Berprestasi

“Kami ingin anak-anak tampil bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga membawa pesan budaya daerah di tingkat nasional,” ujar Arman, Rabu (13/05/2026).

Kontingen tersebut dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, di Aula Kantor Wakil Wali Kota Baubau. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi konsistensi SMPN 18 Baubau yang dua tahun berturut-turut mampu bersaing hingga level nasional.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa

Wakapolda Sultra Turun Langsung Pantau Penanganan Banjir, 650 Warga Kendari Terdampak Banjir

sejumlah akses jalan lingkungan sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

“Curah hujan di wilayah Kendari dan sekitarnya cukup tinggi beberapa hari terakhir, kemudian mengakibatkan meluapnya Sungai Kali Wanggu,” ujar Brigjen Gidion di sela peninjauan lokasi banjir.

Data sementara yang dihimpun aparat menunjukkan sekitar 650 warga terdampak banjir. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, sementara lainnya mengungsi ke tenda darurat karena ketinggian air masih

pembinaan karakter dan disiplin di sekolah berjalan baik. Ini bukan hanya kebanggaan sekolah, tetapi juga kebanggaan Kota Baubau,” kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Ia juga mendorong seluruh sekolah di Kota Baubau agar lebih kreatif mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler melalui pemanfaatan Dana BOS. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang pengembangan bakat siswa, baik di bidang seni, olahraga, pramuka, maupun baris-berbaris.

Secara historis, bu-

daya baris-berbaris di Indonesia berkembang sejak awal masa kemerdekaan sebagai bagian dari pendidikan disiplin dan bela negara. Dalam perkembangannya, LKBB menjadi salah satu kompetisi pelajar paling bergengsi yang menilai ketepatan gerak, kekompakan, kepemimpinan, hingga kreativitas formasi.

Di tingkat internasional, tradisi marching dan drill competition juga berkembang di negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Kompetisi terse-

but digunakan sebagai media pembinaan karakter generasi muda karena dinilai efektif menanamkan disiplin, solidaritas, dan kerja sama tim.

Arman menambahkan, target masuk 10 besar nasional dinilai penting karena menjadi syarat untuk bergabung dalam FOR-BASI atau Federasi Olahraga Baris Berbaris Indonesia tingkat nasional. “Kami optimistis bisa bersaing dengan sekolah terbaik dari seluruh Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah, guru, dan orang tua,” tuturnya.*

Ketua TP Posyandu Enam SPM Buton Selatan Tinjau Layanan Terpadu di Sejumlah Desa

dan anak, tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi hingga tingkat desa,” ujar,

Ny. Hj. Siti Norma Adios, Kamis, (14/5/2026).

Ia menjelaskan, Posyandu 6 SPM merupakan transformasi layanan Posyandu yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertahanan masyarakat (Trantibum Linmas).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP Posyandu 6 SPM bersama OPD pengampu yang terdiri dari Di-

nas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Sosial, serta Satuan Polisi Pamong Praja meninjau langsung pelaksanaan layanan Posyandu guna memastikan kegiatan berjalan rutin setiap bulan sesuai jadwal di desa dan kelurahan.

Selain memantau pelayanan kesehatan, rombongan juga mengevaluasi edukasi keluarga, sanitasi lingkungan, hingga pendataan sosial masyarakat. Mereka turut berdialog dengan kader Posyandu dan warga setempat untuk menyerap berbagai masukan terkait pelayanan dasar di masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh

pelayanan dasar benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat secara mudah, cepat, dan terpadu,” katanya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memastikan pelayanan dasar dapat terlaksana secara efektif, terintegrasi, dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa.

Melalui kunjungan itu, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk mentransformasi Posyandu 6 SPM sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat yang mudah diakses dan berkualitas.*

Warga Terdampak Banjir Kendari Terima Bantuan CSR dari Bank Sultra Berupa 300 Paket Sembako

bencana banjir. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk empati dan dukungan moril kepada keluarga yang sedang mengalami musibah.

Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, mengatakan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat yang tertimpa bencana merupakan bagian dari tanggung jawab moral lembaga keuangan milik daerah.

“Kami merasa prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Kendari. Sebagai bank milik daerah, kami memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu warga yang terdampak,” ujar Andri.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan pemegang saham pengendali, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, agar Bank Sultra berperan aktif dalam penanganan bencana dan pemulihan masyarakat pascabanjir.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat selama masa tanggap darurat. Kami juga akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Kendari agar pemulihan ekonomi masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” katanya.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan konsistensi Bank Sultra dalam mendukung pemerintah daerah di berbagai situasi, termasuk saat bencana melanda wilayah tersebut.

“Bank Sultra tidak pernah absen menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Kehadiran mereka di tengah kondisi darurat seperti ini sangat membantu pemerintah dalam percepatan penanganan bencana,” ujar Siska.

Menurut dia, memasuki hari ketiga masa tanggap darurat, kondisi di sejumlah kawasan terdampak mulai berangsur membaik. Namun, proses pemulihan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat masih membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Bank Sultra yang selalu hadir membina masyarakat dalam berbagai kondisi,” katanya.

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penanganan kebencanaan. Berdasarkan data nasional, Indonesia merupakan salah satu

negara dengan tingkat risiko hidrometeorologi tertinggi di Asia Tenggara akibat curah hujan ekstrem dan perubahan iklim global.

Secara historis, wilayah Sulawesi Tenggara juga beberapa kali mengalami bencana banjir musiman akibat tingginya intensitas hujan dan berkurangnya daya resap lingkungan perkotaan. Di tingkat internasional, berbagai lembaga seperti United Nations dan World Bank berulang kali menekankan pentingnya keterlibatan sektor perbankan dan dunia usaha dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam konteks itu, langkah Bank Sultra dinilai menjadi bagian dari penguatan solidaritas sosial di daerah. Kehadiran dunia usaha pada masa darurat dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sultra menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada pelayanan ekonomi dan keuangan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.*

Tanah Licin Pasca hujan, Pria 75 Tahun di Buton Meninggal Tertindih Pohon Pisang

tak mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi sebelum akhirnya melaporkan insiden itu kepada aparat kepolisian setempat.

Kepala Seksi Humas Polres Buton AKP Anwar mengatakan, aparat kepolisian segera turun ke tempat kejadian perkara (TKP) usai menerima laporan dari warga.

“Begitu menerima informasi, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi,” ujar AKP Anwar, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, korban awalnya hanya berniat menebang satu batang pohon pisang di area kebunnya. Saat proses penebangan berlangsung, korban berusaha menarik pelepah daun agar batang pohon cepat

tumbang.

Namun, upaya tersebut justru menyebabkan tiga pohon pisang lain di sekitar lokasi ikut roboh secara bersamaan. Dalam kondisi medan yang tidak stabil, korban kehilangan kesempatan untuk menghindari.

“Korban diduga berada terlalu dekat dengan arah jatuh pohon. Karena tanah licin dan posisi tubuh tidak seimbang, korban tidak sempat menyelamatkan diri,” kata AKP Anwar.

Batang pohon pisang berukuran besar itu kemudian menimpa tubuh korban hingga menyebabkan luka berat. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis.

Pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam insiden tersebut. Aparat

Wakapolda menegaskan, fokus utama aparat saat ini adalah memastikan tidak ada korban jiwa serta menjamin kondisi kesehatan warga terdampak tetap terpantau. Tim medis diterjunkan untuk mengantisipasi penyakit pascabanjir yang kerap muncul di lokasi pengungsian.

“Yang kita lakukan bersama stakeholder lainnya, pertama memastikan dari aspek keselamatan tidak ada korban jiwa,” tegasnya.

Secara historis, banjir menjadi bencana paling dominan di Indonesia dalam

satu dekade terakhir. BNPB mencatat sebagian besar bencana nasional dipicu faktor hidrometeorologi seperti hujan ekstrem dan meluapnya sungai. Di Sulawesi Tenggara sendiri, banjir besar pernah terjadi pada 2019 dan menyebabkan ribuan warga mengungsi. Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara seperti Pakistan, India, dan Brasil dalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak meningkatnya cuaca ekstrem global akibat perubahan iklim.*

menyimpulkan kejadian murni kecelakaan saat korban melakukan aktivitas penebangan seorang diri di kebun miliknya.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika bekerja di area perkebunan, terutama saat kondisi cuaca kurang baik dan tanah dalam keadaan licin,” tambahnya.

Kecelakaan kerja di sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Data historis menunjukkan, sejumlah insiden serupa pernah terjadi akibat aktivitas penebangan pohon tanpa alat penangan memadai maupun tanpa pendamping kerja.

Pada 2023, misalnya, seorang petani di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa batang

kelapa saat melakukan penebangan di kebun miliknya. Sementara pada 2024, insiden serupa juga terjadi di Sumatera Barat ketika seorang warga tertimpa pohon durian saat membersihkan lahan perkebunan.

Secara internasional, kecelakaan kerja di sektor pertanian juga menjadi perhatian berbagai negara. Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) pernah mencatat bahwa sektor pertanian termasuk salah satu bidang pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan fatal tertinggi di dunia, terutama akibat penggunaan alat berat, penebangan pohon, serta kondisi medan kerja yang ekstrem.

Di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, dan Thailand, kecelakaan di

area perkebunan masih sering dipicu faktor cuaca, minimnya alat keselamatan kerja, dan aktivitas kerja seorang diri tanpa

pengawasan. Peristiwa yang menimpa U menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat bekerja di area perke-

bunan, terutama pada musim hujan ketika kontur tanah menjadi lebih licin dan rawan memicu kecelakaan fatal.*

Presiden Prabowo Sindir Negara Pembeli Beras RI yang Minta Potongan Harga



Prabowo klaim negara lain minta korting beli beras Indonesia.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan meningkatnya permintaan pembelian beras dari sejumlah negara kepada Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global. Namun, ia menyoroti adanya negara pembeli yang meminta potongan harga dalam transaksi ekspor tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.601 Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kepentingan petani dan kebutuhan pangan nasional harus tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Mereka yang dulu merasa lebih hebat sekarang datang ke Indonesia meminta membeli beras,” kata Prabowo di hadapan peserta acara.

Menurut Prabowo, situasi tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia

dalam sektor pangan global. Ketika sejumlah negara menghadapi keterbatasan stok dan lonjakan harga pangan, Indonesia dinilai mampu menjaga cadangan pangan nasional lebih stabil dibanding beberapa negara lain.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap pasokan pangan dunia semakin besar setelah India menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Kebijakan serupa juga dilakukan Bangladesh untuk menjaga kebutuhan domestik mereka. Kondisi itu menyebabkan banyak negara mulai mencari sumber pasokan alternatif, termasuk dari Indonesia.

Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan bahwa pembatasan ekspor pangan oleh negara produsen utama pernah memicu krisis harga pangan global pada 2008 dan kembali terjadi setelah pandemi Covid-19 serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Saat itu, harga beras dunia melonjak tajam akibat

terganggunya rantai distribusi pangan internasional.

Indonesia sendiri pernah mengalami ketergantungan impor beras dalam jumlah besar pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengklaim produksi pangan nasional mulai membaik melalui penguatan cadangan beras pemerintah, modernisasi pertanian, dan peningkatan distribusi pupuk.

Prabowo menegaskan Indonesia tetap terbuka membantu negara lain yang membutuhkan pasokan beras. Akan tetapi, ia meminta agar harga jual tidak terlalu rendah hingga merugikan petani dalam negeri.

“Kalau mereka butuh, kita bantu. Tetapi harganya juga harus baik, jangan sampai petani kita jadi korban,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan Menteri Pertanian dan Perum Bulog agar berhati-hati dalam menentukan harga ekspor. Menurut dia, ancaman krisis pangan global masih dapat ber-

langsung dalam waktu panjang sehingga Indonesia harus mengutamakan keamanan stok nasional.

“Jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa berlangsung lama. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan sindiran terhadap negara pembeli yang meminta diskon besar untuk beras Indonesia. “Ada juga yang mau beli beras, habis itu minta korting banyak sekali. Ini memang situasi krisis dunia,” katanya disambut tawa peserta acara.

Pemerintah menilai meningkatnya minat negara lain terhadap beras Indonesia menjadi indikator membaiknya ketahanan pangan nasional. Meski demikian, pemerintah tetap diminta menjaga keseimbangan antara peluang ekspor dan kebutuhan pangan domestik agar stabilitas harga di dalam negeri tetap terjaga. (*)

Resmikan 1.601 Koperasi, Prabowo Serukan Hapus Mental Bangsa Kalah



Prabowo gebrak podium saat resmikan koperasi merah putih

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan menang saat meresmikan operasionalisasi 1.601 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan penghapusan mentalitas bangsa kalah di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat melalui gerakan koperasi nasional.

Pidato tersebut disampaikan di hadapan para kepala daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat yang menghadiri peluncuran program nasional Koperasi Merah Putih. Dalam suasana penuh semangat, Prabowo beberapa kali mengebrak podium untuk menekankan pentingnya rasa percaya diri bangsa.

“Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia menyebut pemerintah menargetkan peresmian sekitar 30 ribu Koperasi Merah Putih pada Agustus mendatang. Namun, menurut dia, capaian di bawah target sekalipun tetap menjadi prestasi besar yang layak diapresiasi.

“Kalau ump-

amanya tidak sampai 30 ribu, kalau hanya sampai 20 ribu, saya katakan itu prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujarnya.

Prabowo menilai pembangunan koperasi dalam jumlah besar dalam waktu singkat menunjukkan kapasitas pemerintah dan lembaga negara untuk bekerja cepat ketika memiliki tekad dan kerja sama yang kuat. Ia menekankan bahwa kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi masyarakat bawah.

Program Koperasi Merah Putih sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas akses pembiayaan, distribusi pangan, dan penguatan usaha mikro di berbagai daerah. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Secara historis, koperasi memiliki posisi penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena mendorong sistem ekonomi berbasis gotong royong sejak awal kemerdekaan. Pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya tahun 1947, koperasi ditegaskan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat pascakolonialisme.

Di tingkat internasional, model koperasi juga berkembang kuat di sejumlah negara seperti Finlandia, Jepang, dan Selandia Baru. International Cooperative Alliance (ICA) mencatat lebih dari satu miliar penduduk dunia menjadi anggota koperasi, sementara koperasi berkontribusi besar terhadap sektor pangan, pertanian, dan keuangan di berbagai negara.

Prabowo mengatakan keberhasilan membangun koperasi secara masif harus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama.

“Kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta acara.

Peluncuran ribuan Koperasi Merah Putih di Nganjuk dinilai menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketidakpastian geopolitik internasional. Pemerintah berharap gerakan koperasi dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional berbasiskan masyarakat. (*)

RS Oputa Yi Koo Kendari Resmi Buka Layanan Intervensi Jantung Modern anpa Harus ke Luar Daerah



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memperkuat layanan kesehatan spesialistik dengan menghadirkan tindakan Intervensi Non Bedah (INB) jantung di RSJPD Oputa Yi Koo Kendari, Jumat (15/5/2026)

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memperkuat layanan kesehatan spesialistik dengan menghadirkan tindakan Intervensi Non Bedah (INB) jantung di RSJPD Oputa Yi Koo Kendari, Jumat (15/5/2026). Kehadiran layanan tersebut menjadi tonggak baru pelayanan kesehatan di Sultra karena pasien jantung kini mulai dapat ditangani di daerah sendiri tanpa harus banyak dirujuk ke Makassar maupun Jakarta.

Pelayanan perdana itu sekaligus diikuti penandatanganan kerja sama jejaring pengampuan layanan jantung dan pembuluh darah bersama rumah sakit daerah di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Program tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan RI, RSJPD Harapan Kita Jakarta, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, serta RSJPD Oputa Yi Koo Kendari.

Direktur RSJPD Oputa Yi Koo Kendari, dr. Agus Purnomo Hidayat, mengatakan tindakan Intervensi Non Bedah telah mulai dilakukan sejak sehari sebelumnya

terhadap tujuh pasien asal Bombana, Kolaka Timur, Konawe, dan Kota Kendari.

“Melalui pendampingan rumah sakit pengampu nasional dan regional, kami berharap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien terus meningkat,” kata Agus.

Ia menjelaskan tingginya jumlah pasien yang menjalani tindakan menunjukkan kebutuhan layanan jantung di Sulawesi Tenggara masih cukup besar. Selama ini sebagian pasien harus menunggu antrean rujukan keluar daerah dengan biaya transportasi dan pendampingan keluarga yang tidak sedikit.

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak beberapa tahun terakhir juga mencatat penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 17 juta kematian setiap tahun di dunia atau menjadi penyebab kematian nomor satu secara internasional.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sultra,

Muhammad Fadlansyah, menilai penguatan layanan jantung merupakan bagian dari pemerataan pelayanan kesehatan di daerah.

“Harapannya masyarakat Sulawesi Tenggara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan proctorship layanan jantung tersebut.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Affan Priyambodo Permana, menyampaikannya mendukung transfer pengetahuan, teknologi medis, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara.

Menurut Affan, keberhasilan layanan kesehatan tidak hanya ditentukan kemampuan tenaga medis, tetapi juga tata kelola rumah sakit, budaya keselamatan pasien, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem rujukan yang terintegrasi.

“Kami berharap penanganan pasien jantung di Sulawesi Tenggara bisa dilakukan lebih cepat sehingga kebu-

tuhan rujukan keluar daerah semakin berkurang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Layanan Operasional RSJPD Harapan Kita Jakarta, Dr. Harudin, menyebut hadirnya layanan intervensi non bedah di Sultra sebagai kemajuan penting pelayanan kesehatan kawasan timur Indonesia.

“Masyarakat Sultra kini tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan jantung tertentu karena sudah mulai bisa dilakukan di daerah sendiri,” ujarnya.

Program pengampuan rumah sakit sendiri merupakan bagian dari transformasi kese-

hatan nasional yang dijalankan Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat layanan prioritas, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Adapun rumah sakit yang bergabung dalam jejaring tersebut antara lain RSUD Buton Tengah, RSUD Kolaka Timur, RSUD Bombana, RSUD Konawe Selatan, RSUD Konawe, RSUD Kota Bau-

bau, RSUD Kota Kendari, hingga RSUD Wakatobi. (*)

Presiden Resmikan 1.061 Koperasi, Sultra Siapkan Ribuan Unit Baru



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut dipusatkan di Terminal Baruga, Kota Kendari, Sabtu (16/5/2026), bersamaan dengan peresmian nasional 1.061 koperasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Peresmian nasional itu menandai dimulainya pengoperasian koperasi modern yang terintegrasi dengan sistem logistik, distribusi pangan, pergudangan, hingga layanan kebutuhan masyarakat. Secara nasional, program Koperasi Merah Putih disebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga pangan internasional.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka mengatakan, Sulawesi Tenggara termasuk daerah yang bergerak cepat dalam pembangunan koperasi tersebut. Dari 771 koperasi yang sedang berproses di Sultra, sebanyak 75 unit telah rampung dan siap beroperasi penuh.

“Jadi hari ini adalah peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden. Di Sultra yang sudah operasional dan sudah seperti ini ada 75 koperasi,” ujar Andi Sumangerukka usai mengikuti peresmian virtual bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Sultra, Wali Kota Kendari,

Plh Sekda Sultra, dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Menurut dia, koperasi tersebut nantinya menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat di desa dan kelurahan. Pemerintah pusat juga segera menyalurkan pasokan sembako ke koperasi yang telah siap beroperasi.

“Sekarang tinggal tahap pengisian. Nantinya kebutuhan sembako akan didistribusikan dari pusat melalui koperasi untuk membantu masyarakat,” katanya.

Pemprov Sultra menargetkan seluruh fasilitas koperasi yang saat ini dalam tahap pembangunan dapat mulai terisi pada pekan kedua Juli 2026. Pemerintah daerah juga terus mempercepat penyelesaian infrastruktur pendukung agar koperasi dapat segera berfungsi optimal.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan koperasi di sejumlah daerah sempat menghadapi kendala keterbatasan aset dan lahan. Namun, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota mengatasi persoalan tersebut dengan menyiapkan aset daerah untuk dimanfaatkan sebagai lokasi operasional koperasi.

Secara keseluruhan, jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun di Sulawesi Tenggara mencapai 2.273 unit yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Program itu diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi pangan sekaligus membuka ruang usaha baru bagi masyarakat.

Secara historis, koperasi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan

ekonomi Indonesia sejak era Wakil Presiden pertama, Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional sejak 1947 untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Di tingkat internasional, model koperasi modern juga berkembang pesat di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Belanda yang menjadikan koperasi sebagai penggerak distribusi pangan, pembiayaan petani, hingga penguatan usaha mikro. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat koperasi dunia saat ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi ratusan juta orang dan menjadi instrumen penting pengurangan kemiskinan global.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis membangun kemandirian bangsa dari tingkat desa dan kelurahan. “Hari ini kita meresmikan lebih dari seribu koperasi yang memiliki gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional, hingga dukungan logistik. Ini adalah langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah,” ujar Presiden.

Peresmian serentak tersebut menjadi momentum pemerintah memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi modern di tengah upaya menjaga stabilitas pangan nasional dan memperluas akses kebutuhan pokok masyarakat hingga wilayah terpencil. (*)

Ridwan Bae Kawal Pembangunan Jalan dan Program Unggulan Buteng, Labungkari Samentaeno Tandai Lompatan Infrastruktur



Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meluncurkan program Labungkari Samentaeno di ruas Jalan Poros RSUD Buton Tengah, Sabtu (16/5/2026)

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah meluncurkan program Labungkari Samentaeno di ruas Jalan Poros RSUD Buton Tengah, Sabtu (16/5/2026), sebagai penanda percepatan pembangunan infrastruktur dan peluncuran sejumlah program strategis daerah. Kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong konektivitas wilayah serta penguatan ekonomi masyarakat.

Peluncuran program itu dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Hartono, Bupati Buton Tengah, Azhari, jajaran organisasi perangkat daerah, serta ribuan warga dari berbagai kecamatan di Buton Tengah.

Selain menjadi seremoni syukuran atas pembangunan jalan melalui Program Impres Jalan Daerah (IJD), kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pameran UMKM, promosi kuliner lokal, senam bersama, penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat, hingga deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Damai.

Pemerintah daerah turut meluncurkan sejumlah program unggulan, di antaranya Desa Wisata, Badan Promosi Kabupaten, Geopark Pulau Muna, One Village Sport, Marine Trans Buton Tengah, dan layanan transportasi daring Anoa yang disebut sebagai layanan transportasi online pertama di daerah tersebut.

Bupati Buton Tengah, Azhari, mengatakan keberhasilan pembangunan jalan itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui perjuangan aspirasi daerah di DPR RI. Menurut dia, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah kepulauan.

"Jalan yang sekarang menjadi kebanggaan masyarakat ini merupakan hasil perjuangan bersama. Setelah ini masih ada dua paket pembangunan jalan lain yang sedang kami perjuangkan," kata Azhari dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini juga menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara disebut akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk penanganan ruas jalan provinsi yang kondisinya masih rusak.

Menurut Azhari, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan seperti Buton Tengah. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat menentukan percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa perannya adalah menjembatani aspirasi pemerintah daerah agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Ia menilai Buton Tengah memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan kepulauan di Sulawesi Tenggara.

"Saya hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tanpa usulan resmi dan perencanaan matang dari pemerintah daerah, program pembangunan tidak mungkin bisa direalisasikan," ujar Ridwan.

Ridwan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun pagu anggaran nasional sekitar Rp35 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun

depan, dengan sekitar Rp16 triliun dialokasikan khusus bagi Program IJD. Menurut dia, peluang tersebut akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan lanjutan pembangunan jalan di Buton Tengah.

Secara historis, Program Impres Jalan Daerah merupakan pengembangan dari kebijakan pembangunan konektivitas nasional yang mulai diperkuat pemerintah sejak era Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada dekade 1970-an. Dalam konteks global, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi strategi utama banyak negara kepulauan seperti Jepang dan Filipina dalam mempercepat distribusi ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Ridwan turut mengapresiasi pemanfaatan ruas jalan baru yang kini berkembang menjadi ruang publik masyarakat. "Jalan ini bukan hanya sarana transportasi, tetapi sudah menjadi pusat aktivitas olahraga dan ekonomi kreatif warga," katanya. (*)

Pemkab Buton Lepas 11 Jemaah Haji, Dijadwalkan Terbang 16 Mei



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton resmi melepas 11 calon jemaah haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Rabu (13/5/2026). Para jemaah dijadwalkan bertolak dari Baubau menuju Makassar pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, pada 16 Mei 2026.

Prosesi pelepasan dilakukan Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, yang mewakili Bupati Buton dengan menyerahkan Bendera Merah Putih kepada ketua rombongan jemaah haji Kabupaten Buton. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Plt Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buton, pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua Baznas, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam sambutannya, Syarifudin menegaskan bahwa para calon jemaah haji merupakan warga terpilih yang memperoleh kesempatan memenuhi panggilan ibadah ke Tanah Suci. "Para jemaah calon haji ini merupakan orang-orang yang terpilih dari kita semua untuk memenuhi undangan

Allah dan Insya Allah menjadi haji mabrur," ujarnya.

Ia juga meminta para jemaah menjaga nama baik Kabupaten Buton selama menjalankan ibadah haji. Menurut dia, keberangkatan jemaah tidak hanya membawa identitas pribadi dan keluarga, tetapi juga mencerminkan karakter masyarakat Buton yang religius. "Tolong titip nama Buton dan masyarakat Buton. Sesuai visi Buton Bersinar, kita ingin masyarakat Buton yang religius," kata Syarifudin.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buton, La Kuru, S.Ag., menjelaskan kuota haji Kabupaten Buton tahun ini berjumlah 11 orang yang terdiri atas empat laki-laki dan tujuh perempuan. Sebanyak tujuh jemaah berasal dari Kecamatan Pasarwajo, dua orang dari Kecamatan Wolowa, dan dua lainnya berasal dari Kecamatan Lasilimu.

La Kuru juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton yang membantu pembiayaan tiket pesawat domestik rute Baubau-Makassar dan Makassar-Baubau bagi seluruh jemaah. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemda Buton atas

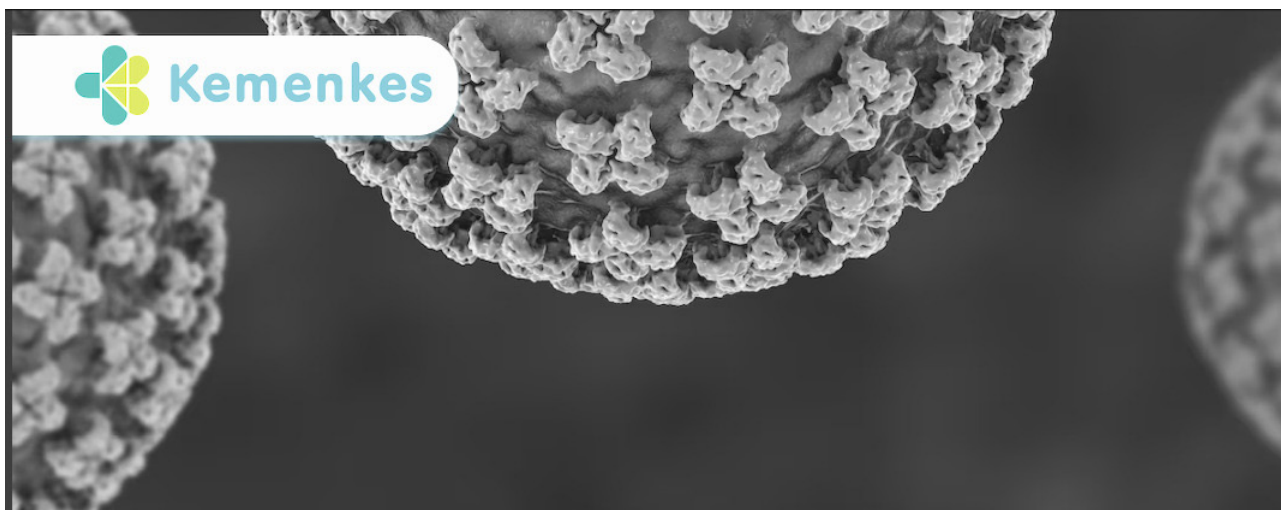
bantuan biaya tiket pesawat pulang pergi bagi jemaah calon haji," ujarnya.

Secara nasional, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2026 masih menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperoleh kuota lebih dari 220 ribu jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbanyak secara global sejak dekade 1980-an.

Dalam catatan historis, perjalanan haji masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-16 melalui jalur pelayaran laut yang memakan waktu berbulan-bulan. Setelah era penerbangan komersial berkembang pada pertengahan abad ke-20, waktu tempuh jemaah Indonesia menuju Arab Saudi menjadi jauh lebih singkat dan efisien. Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan pelayanan haji melalui digitalisasi sistem manasik, kesehatan, hingga pengelolaan transportasi jemaah.

Berdasarkan jadwal resmi, jemaah calon haji Kabupaten Buton akan kembali tiba di Makassar pada 27 Juni 2026 pukul 12.00 WITA setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. (*)

Hantavirus di Jakarta Terkendali, Menkes Minta Warga Tetap Tenang



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah memastikan kasus Hantavirus yang ditemukan di DKI Jakarta masih dalam kondisi terkendali. Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh kontak erat pasien selama 14 hari guna mencegah potensi penularan lanjutan penyakit yang berasal dari hewan pengerat tersebut.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan seluruh kontak erat yang telah diperiksa hingga kini menunjukkan hasil negatif. Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan pengawasan ketat sampai masa inkubasi selesai.

"99 persen penularan Hantavirus terjadi melalui tikus, bukan antarmanusia," ujar Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026).

Kasus tersebut bermula dari laporan otoritas kesehatan Inggris yang diterima pemerintah Indonesia pada 7 Mei 2026 terkait seorang warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan menggunakan kapal luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran cepat, pasien berhasil diidentifikasi sehari kemudian dan langsung dievakuasi ke RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi.

Menurut Menkes, respons cepat itu menunjukkan kapasitas surveilans kesehatan Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi COVID-19. Pemerintah kini dinilai lebih siap dalam mendeteksi serta menangani penyakit menular lintas negara.

"Indonesia sejak pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik dalam hal surveilans dan kerja sama internasionalnya," kata Budi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, menjelaskan pasien ditempatkan di RSPI Sulianti Saroso karena rumah sakit tersebut memiliki fasilitas dan tenaga medis khusus penyakit infeksi. Langkah isolasi di rumah sakit dipilih meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbolehkan karantina mandiri.

"Karena itu rumah sakit khusus infeksi, sehingga kita bisa benar-benar fokus menangani pasiennya," tutur Andi.

Secara medis, penyakit yang disebabkan Orthohantavirus umumnya menular melalui paparan urin, air liur, maupun feses tikus

dan hewan pengerat lainnya. Hantavirus memiliki dua manifestasi utama, yakni Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal serta Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru. Hingga kini belum tersedia terapi spesifik sehingga penanganan dilakukan secara suportif sesuai gejala pasien.

Berdasarkan data historis internasional, wabah Hantavirus pernah menjadi perhatian dunia pada 1993 ketika terjadi lonjakan kasus HPS di wilayah Four Corners, Amerika Serikat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mencatat wabah tersebut menyebabkan puluhan kematian dan mendorong penguatan sistem deteksi penyakit zoonosis global. Sementara di Asia, kasus HFRS telah lama ditemukan di China dan Korea Selatan dengan tingkat kejadian relatif lebih tinggi dibanding negara lain.

Di Indonesia sendiri, kasus Hantavirus bukan pertama kali ditemukan. Kementerian Kesehatan sebelumnya pernah

melaporkan sejumlah kasus sporadis di beberapa daerah, terutama yang memiliki populasi tikus tinggi dan sanitasi lingkungan kurang baik. Namun, penularan antarmanusia di Indonesia hingga kini belum menjadi pola dominan.

Menkes menjelaskan varian Hantavirus yang ditemukan di Indonesia merupakan varian Asia dengan tingkat kematian berkisar 5 hingga 15 persen. Angka itu dinilai jauh lebih rendah dibanding varian Andes di Amerika Selatan yang memiliki fatalitas mencapai 50 hingga 60 persen.

"Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman," tegas Budi.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang serta meningkatkan kebersihan lingkungan dengan mengendalikan populasi tikus di rumah, rumah makan, pasar, dan tempat kerja. Langkah pencegahan dinilai menjadi kunci utama untuk menekan risiko penyebaran penyakit zoonosis di tengah meningkatnya mobilitas global. (*)

Nutri-Level Resmi Diterapkan, Kemenkes Gandeng Dunia Usaha



Peliput: Warman

JAKARTA, BP- Pemerintah mulai memperkuat edukasi konsumsi sehat masyarakat melalui penerapan program pelabelan nutrisi "Nutri-Level" yang resmi diluncurkan Kementerian Kesehatan RI bersama sektor swasta di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa (12/5). Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada minuman siap saji sekaligus menekan peningkatan penyakit tidak menular di Indonesia.

Langkah tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Lippo Mall, Universitas Pelita Harapan, dan PT Siloam International Hospitals Tbk. Pada tahap awal, penerapan label Nutri-Level mulai diberlakukan di gerai Fore Coffee dan Xing Fu Tang yang berada di kawasan Lippo Mall Nusantara.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Selain itu, masa hidup sehat atau healthy life expectancy juga diupayakan meningkat dari usia

60 tahun menjadi 65 tahun.

"Program ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi gerakan nasional untuk menyelamatkan nyawa masyarakat melalui informasi nutrisi yang transparan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

Menurut data The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, penyakit tidak menular masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Stroke tercatat menyebabkan 337.277 kematian, penyakit jantung 264.668 kematian, penyakit ginjal 56.118 kematian, dan hipertensi 51.623 kematian. Sementara prevalensi penyakit ginjal di Indonesia mencapai lebih dari 35,2 juta kasus.

Secara historis, beban penyakit tidak menular di Indonesia terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi hipertensi nasional pada 2007 berada di angka 31,7 persen dan masih menjadi ancaman serius hingga kini. Tren global juga menunjukkan hal serupa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 74 persen kematian dunia setiap tahun disebabkan penyakit tidak menular seperti jan-

tung, diabetes, kanker, dan stroke.

Budi menilai keberhasilan sektor kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. "Kita ingin masyarakat berpindah menuju gaya hidup baru yang lebih sadar terhadap apa yang dikonsumsi setiap hari," ujarnya.

Sementara itu, President Universitas Pelita Harapan, Stephanie Riady, menyebut edukasi Nutri-Level akan diperluas melalui jaringan digital di pusat perbelanjaan dan platform komersial di berbagai daerah. "Kami ingin edukasi kesehatan hadir di ruang yang dekat dengan aktivitas masyarakat sehingga perubahan pola hidup sehat dapat berlangsung secara nyata dan berkelanjutan," tutur Stephanie.

Program sosialisasi tersebut rencananya akan ditayangkan melalui digital signage di 70 pusat perbelanjaan yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota di Indonesia. Pemerintah berharap pelabelan nutrisi sederhana dengan kategori A hingga D itu dapat menjadi langkah awal membangun budaya konsumsi sehat masyarakat Indonesia di tengah meningkatnya ancaman penyakit kronis global. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
 Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
 Redpel: Prasetyo
 Korlip: Firman
 Redaktur: Kasrun, Rahim
 Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
 Pracetak: Aditya
 Cetak: Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
 Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
 Komisaris: Erna Agule
 Direktur Utama: Andina Latief
 Manager Keuangan: Nabila DAA
 Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
 Kepala Sirkulasi: Robi
 Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
 Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
 Kepala Biro Buton: La Harman
 Kepala Biro Buton Selatan: Firman
 Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
 Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
 Agen Buton Selatan: Firman
 Agen Buton: Samrihan
 Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Kepala Biro Wakatobi: Risman
 Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
 Kepala Biro Buton: La Harman
 Kepala Biro Buton Selatan: Firman
 Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
 Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
 Agen Buton Selatan: Firman
 Agen Buton: Samrihan
 Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Imigrasi Surabaya Selidiki Kematian WNA India Kasus Overstay 248 Hari



Ilustrasi: Imigrasi Surabaya Selidiki Kematian WNA India Kasus Overstay 248 Hari

Laporan: Amran

SURABAYA, BP- Seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial SN (48) ditemukan meninggal dunia di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya di kawasan Juanda, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/5) pagi. Korban sebelumnya ditahan karena diduga melanggar aturan keimigrasian akibat overstay selama 248 hari dan dijadwalkan deportasi ke negara asalnya pada 17 Mei 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, mengatakan petugas menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa saat melakukan pengecekan rutin ruang detensi sekitar pukul 07.50 WIB.

"Atas kejadian tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Menurut Agus, kasus itu bermula

la dari laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sidoarjo terkait persoalan keluarga dan pemenuhan hak anak yang melibatkan WNA tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, SN diketahui telah melewati masa izin tinggal di Indonesia selama lebih dari delapan bulan.

SN kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Imigrasi Surabaya dengan pendampingan dari pihak UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sebelum akhirnya ditempatkan di ruang detensi sejak Senin (11/5).

"WN India tersebut sebelumnya ditahan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Agus.

Saat ini, pihak Imigrasi Surabaya masih berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo, Polsek Sedati, serta

rumah sakit terkait untuk proses penyelidikan, visum et repertum, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian korban.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Konsulat Kehormatan India di Surabaya untuk menyampaikan informasi kepada pihak keluarga sekaligus pemulangan jenazah sesuai prosedur konsuler internasional.

"Kami turut berduka cita atas kejadian ini. Kami memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Agus.

Kasus kematian warga asing di ruang detensi imigrasi bukan

kali pertama terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara menghadapi sorotan terkait kondisi ruang penahanan imigrasi, termasuk persoalan kesehatan mental dan tekanan psikologis terhadap tahanan yang menunggu deportasi. Di

Indonesia, isu pengawasan ruang detensi juga pernah menjadi perhatian setelah beberapa kasus kematian dan gangguan kesehatan penghuni detensi imigrasi mencuat ke publik.

Secara internasional, lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti United Nations High Commissioner for Refugees dan International Organization for Migration beberapa kali menyuarakan pengawasan ketat terhadap kondisi psikologis tahanan imigrasi, terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan sosial, persoalan keluarga, hingga ancaman deportasi.

Pihak Imigrasi Surabaya menyatakan akan melakukan evaluasi internal terhadap prosedur penanganan ruang detensi, sekaligus memastikan perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan perkara tersebut tetap menjadi perhatian utama bersama instansi terkait. (*)

Anggota TNI Tewas di Kafe Palembang, CCTV dan Saksi Diperiksa

Laporan: Hadi

PALEMBANG, BP- Insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota TNI terjadi di sebuah kafe di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5) dini hari. Seorang prajurit berinisial P meninggal dunia setelah diduga ditembak rekannya sendiri berinisial R (23) saat terjadi keributan di lokasi hiburan malam tersebut.

Kodam II/Sriwijaya memastikan penanganan perkara dilakukan secara serius, profesional, dan terbuka. Pangdam II/Sriwijaya disebut telah memerintahkan jajaran intelijen dan Polisi Militer untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap fakta peristiwa secara utuh.

"Pangdam telah memerintahkan Asintel Kasdam II/Swj dan Danpomdam II/Swj untuk segera menangani di lapangan melalui penyelidikan mendalam," ujar Kapendam II/Sriwijaya Letkol Inf Yordania.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.40 WIB di Kafe Panhead, Palembang. Berdasarkan informasi awal, korban dan pelaku diduga terlibat salah paham saat berjoget di dalam kafe. Ketegangan kemudian berkembang menjadi cecok dan berujung perkelahian.

Di tengah keributan tersebut, pelaku diduga

mengeluarkan senjata api yang dibawanya lalu melepaskan satu kali tembakan ke arah korban. Peluru mengenai bagian perut sebelah kanan korban hingga menyebabkan luka serius.

Korban sempat dilarikan ke RS Permata Palembang untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Namun, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah kondisinya tidak tertolong akibat luka tembak yang dialaminya.

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kopol Fauzi Saleh membenarkan adanya insiden yang menyebabkan seorang anggota TNI meninggal dunia. "Benar ada kejadian keributan semalam di Kafe Panhead, korban ada yang meninggal dunia," kata Fauzi.

Saat ini, aparat gabungan dari Polresta Palembang dan Denpom TNI AD masih melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, mendalami rekaman CCTV, serta mengumpulkan barang bukti lainnya. Proses autopsi terhadap jenazah korban juga dilakukan untuk kepentingan penyelidikan.

Yordania menegaskan TNI turut berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan guna memastikan pengungkapan kasus berjalan objektif dan komprehensif. "Proses penyelidikan

akan memakan waktu agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara akurat berdasarkan fakta di lapangan," ujarnya.

Kasus kekerasan yang melibatkan aparat bersenjata sebelumnya juga pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi terkait disiplin personel dan pengawasan penggunaan senjata api menjadi perhatian institusi keamanan nasional untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun konflik internal.

Di tingkat internasional, kasus serupa juga pernah terjadi di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Thailand, ketika personel militer atau aparat keamanan terlibat insiden penembakan di ruang publik. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian mendorong penguatan regulasi penggunaan senjata api, pengawasan psikologis personel, serta peningkatan disiplin internal di institusi militer.

Kodam II/Sriwijaya turut menyampaikan dukacita atas meninggalnya korban dan mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. "Kami mengajak seluruh pihak menunggu hasil resmi penyelidikan agar situasi tetap kondusif," kata Yordania. (*)

Kadis Perdagangan Baubau Suarmawati Sidak Pasar Lowu-lowu dan Temui Pedagang

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau mulai memprioritaskan pembenahan Pasar Lowu-lowu sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Langkah itu ditandai dengan kunjungan langsung Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Baubau ke kawasan pasar tersebut pada Sabtu (16/5/2026).

Dalam kunjungan itu, pemerintah tidak hanya meninjau kondisi fisik pasar, tetapi juga menyerap aspirasi para pedagang terkait kebutuhan mendesak yang dinilai memengaruhi aktivitas perdagangan sehari-hari.

"Kami ingin memastikan kondisi pasar benar-benar diketahui secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan di atas meja. Aspirasi pedagang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah," ujar Kepala Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Suarmawati saat berdialog dengan pedagang di Pasar Lowu-lowu.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut meliputi kebersihan area pasar, penataan lapak, pengelolaan parkir, hingga kenyamanan ruang berjualan bagi pedagang dan pengunjung.

Para pedagang juga menyampaikan kondisi stabilitas harga kebutuhan pokok serta pasokan barang yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah agar aktivitas jual beli tetap berjalan lancar.

"Kami berharap ada penataan yang lebih baik, terutama area parkir dan kebersihan pasar supaya pembeli merasa nyaman datang berbelanja," kata salah seorang pedagang saat menyampaikan aspirasinya.

Pemerintah Kota Baubau menilai pasar tradisional masih



Kadisperindakop Baubau Suarmawati Tinjau Pasar Lowu-lowu

menjadi pusat utama perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kecil. Karena itu, keberadaan pasar dinilai harus terus dijaga agar mampu bersaing di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern.

Secara historis, pasar tradisional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kementerian Perdagangan RI mencatat pasar rakyat menjadi penopang utama distribusi barang kebutuhan pokok di berbagai daerah sejak era awal pembangunan ekonomi Indonesia pada dekade 1970-an.

Di tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) juga pernah menegaskan bahwa pasar tradisional berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan lokal dan keberlangsungan usaha kecil di negara

berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

"Kami tidak ingin pasar tradisional kehilangan daya saing. Pembenahan akan dilakukan secara bertahap agar pedagang maupun masyarakat sama-sama merasakan manfaatnya," ujar Suarmawati.

Selain memantau aktivitas perdagangan, pemerintah juga melihat langsung kondisi fasilitas publik di kawasan pasar guna memastikan lingkungan perdagangan tetap tertata dan sehat.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang sehingga setiap persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.*

Pemkot Baubau Cari Solusi Lahan untuk dirikan 43 Koperasi Merah Putih, Saat Ini Baru Enam Yang Dibangun

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau masih menghadapi persoalan keterbatasan lahan dalam merealisasikan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Dari total 43 kelurahan yang ada, baru enam gerai koperasi yang telah dibangun maupun masih dalam tahap progres pembangunan.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darussalam, mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat pembangunan gerai koperasi sebagai bagian dari Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih.

"Kita terus berupaya bagaimana ke depannya setiap kelurahan ada Koperasi Merah Putihnya, tapi kembali lagi aset kota yang sangat terbatas. Mungkin

nanti akan ada langkah lain yang dilakukan," ujar Darussalam.

Menurut dia, Pemerintah Kota Baubau telah mengikuti agenda peresmian serentak 1.061 Koperasi Merah Putih bersama Presiden Republik Indonesia melalui sambungan virtual beberapa waktu lalu. Salah satu gerai yang ikut diresmikan berada di wilayah Kota Baubau.

"Saat ini yang sudah terbangun dan sementara progres ada enam gerai. Salah satunya lokasi yang saat ini kita zoom bersama Bapak Presiden terkait peresmian Koperasi Merah Putih serentak seluruh Indonesia," katanya.

Upaya penyediaan lahan juga telah dibahas bersama berbagai pihak, termasuk TNI. Pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung pembangunan gerai koperasi di wilayah



yang belum memiliki lahan pemerintah kota.

"Kita juga sudah pernah rapat dengan Pak Dandim waktu zoom beberapa waktu lalu, bisa menggunakan lahan provinsi maupun BUMN," tambah Darussalam.

Saat ini, gerai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lakologou dibangun di atas lahan milik pemerintah provinsi. Sementara gerai yang berdiri di atas aset Pemerintah Kota Baubau berada di Kelurahan Bukit

Wolio Indah, Lowu-lowu, dan Liwuto. Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan di wilayah Palabusa melalui lahan hibah masyarakat.

Di tempat yang sama, Project Management Officer (PMO) Kementerian Koperasi Kota Baubau, Muhamad Syahadat, mengungkapkan seluruh Koperasi Kelurahan Merah Putih sebenarnya telah terbentuk sejak Agustus 2025. Namun pembangunan

fisik gerai dan gudang masih memerlukan dukungan izin pemanfaatan aset daerah.

"Sebanyak 43 Koperasi Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk di Kota Baubau," ujar Syahadat didampingi Widhy Bintang Lestari.

Ia menjelaskan, pihak pengurus koperasi bersama pemerintah kelurahan telah mengidentifikasi sedikitnya 21 titik lahan yang diusul-

kan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Koperasi Kota Baubau. Akan tetapi, hingga kini sebagian besar usulan tersebut belum memperoleh kepastian izin pemanfaatan aset.

"Kami harapkan jika dianggap layak agar lahan ataupun aset pemerintah daerah itu diberi izin pemanfaatan aset lahan untuk pembangunan gudang dan gerai Koperasi Mer-

ah Putih guna mendukung percepatan pembangunan gerai," katanya.

Secara historis, gerakan koperasi di Indonesia telah menjadi bagian penting pembangunan ekonomi rakyat sejak era awal kemerdekaan. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia pernah menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Di tingkat internasional, model koperasi modern berkembang sejak berdirinya Rochdale Society of Equitable Pioneers di Inggris pada 1844 yang kemudian menjadi rujukan gerakan koperasi dunia. Pemerintah menilai program Koperasi Merah Putih merupakan upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kolektif berbasis komunitas di tengah tantangan ekonomi global dan ketahanan pangan nasional.*